



**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, AKUNTABILITAS, DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP
PRODUKTIVITAS SEKOLAH
(Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1 Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

Lucia Clarissa Arens

110810301048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, AKUNTABILITAS, DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP
PRODUKTIVITAS SEKOLAH**

(Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1 Jember)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Lucia Clarissa Arens

110810301048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Arnoldus Soro dan Beatrix Dasowio yang dengan sabar dan tanpa lelah mendukung saya, baik ketika putus asa hingga semangat kembali, baik secara materi maupun dengan mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Kakak-kakakku tersayang, Maria Claudia Melanie dan Fransiskus Xaverius Junago, serta adikku Albert Sebastian Gani yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen-dosen Akuntansi Universitas Jember, terlebih dosen pembimbing yang dengan sabar dan tidak kenal lelah membantu, membimbing, dan membagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
4. Irene, Prisca, Doris, Aulia, Priska dan Intan yang dengan setia selalu bersama sejak awal kuliah dan selalu memberikan dorongan dan semangat yang tak henti-hentinya.
5. Rekan Penyiar Radio Suara Sayup FM Della, Tejak, Kak Lilin, Mas Riyo, serta Komunitas Tritunggal Mahakudus Muda – Mudi Distrik Jember, dan Orang Muda Katolik Paroki Santo Yusup Jember yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa bagi saya.
6. Teman-teman Akuntansi angkatan 2011 yang selalu membantu dan berbagi keceriaan sejak awal kuliah.

MOTO

“Temukan Tuhan dalam diam karena Ia adalah teman dari kesunyian.

Lihatlah bagaimana bunga dan pohon tumbuh dalam diam,
matahari dan bulan bergerak dalam kesunyian.

Kita harus belajar diam dan tenang
untuk dapat menemukanNya di kedalaman hati kita”

(Mother Teresa)

“Berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki,
dan itu mungkin tidak akan pernah cukup.

Tetapi tetaplah berikan yang terbaik.

Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan
atas perbuatan baik yang engkau lakukan.

Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur
dan Dia melihat ketulusan hatimu.”

(Mother Teresa)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucia Clarissa Arens

NIM : 110810301048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Prinsip Keadilan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2017

Yang menyatakan,

Lucia Clarissa Arens

110810301048

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH PRINSIP KEADILAN,
AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP
PRODUKTIVITAS SEKOLAH (KAJIAN
PERSEPSI GURU SDN JEMBER LOR 1)

Nama Mahasiswa : Lucia Clarissa Arens
NIM : 110810301048
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 31 Januari 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II,

Andriana SE., M.Sc.

NIP. 198209292010122002

Drs. Djoko Supatmoko MM, Ak.

NIP. 195502271984031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M. Com., Ak.

NIP. 196408091990032001

SKRIPSI

**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PRODUKTIVITAS**

SEKOLAH

(Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1)

Oleh

Lucia Clarissa Arens

NIM 110810301048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana SE., M.Sc.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Supatmoko MM., Ak.

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, AKUNTABILITAS, DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP
PRODUKTIVITAS SEKOLAH
(Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lucia Clarissa Arens

NIM : 110810301048

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ketua : Dr. Yosefa Sayekti M. Com, Ak (.....)
NIP. 196408091990032001

Sekretaris : Taufik Kurrohman SE., M. Si., Ak (.....)
NIP. 19820723200501002

Anggota : Dewi Ayu Puspita SE., MSA, Ak (.....)
NIP. 198602162015042003

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

FOTO
4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

Lucia Clarissa Arens

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRACT

This research was done in Jember Lor 1 Elementary School. The purpose of this study is to investigate the influence of fairness, accountability, and transparency budget's management to school productivity which reviewed by teacher's perception at Jember Lor 1 Elementary School. The method used in this research is quantitative-descriptive approach, primary data, with data collection technique is purposive sampling with used questionnaire, and data analyzing technique is using quality test, normality test, multiple linier analyze, F-test, and t-test. The result of this research is the fairness, accountability, and transparency budget's management influential to Jember Lor 1 Elementary School productivity. Recommendations for the next research can used other variable for know what others variable which can influence to productivity and looking the others sample and research's object.

Keywords: *Fairness, Accountability, Transparency, Productivity*

Lucia Clarissa Arens

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di SDN Jember Lor 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah yang dikaji sesuai dengan persepsi guru SDN Jember Lor 1. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif-deskriptif, jenis data primer, dengan teknik pengumpulan data yaitu *purposive sampling* dengan media kuesioner, serta teknik analisis data dengan menggunakan uji kualitas data, uji normalitas data, analisis regresi berganda, uji F dan uji t. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah SDN Jember Lor 1. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya juga menggunakan variable-variabel lain untuk mengetahui variable apa saja yang juga berpengaruh terhadap produktivitas dan mampu memperbanyak jumlah sampel dan objek penelitiannya.

Kata kunci: Prinsip Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Produktivitas

RINGKASAN

Pengaruh Prinsip Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1), Lucia Clarissa Arens;110810301048;2017;66halaman;Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pendidikan di Indonesia memang memiliki banyak rintangan dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan, salah satunya dengan mengubah strategi manajemen yang berfokus untuk meningkatkan produktivitas sekolah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip yang melandasi pengelolaan dana pendidikan adalah prinsip keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Di tahun sebelumnya, SDN Jember Lor 1 memiliki program yaitu dana sukarela, yang mana pada tahun 2016 lalu, Bupati mengeluarkan kebijakan agar setiap lembaga pendidikan dilarang untuk menarik biaya dari wali murid dalam bentuk apapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif dengan data primer. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan media kuesioner yang dibagikan kepada guru SDN Jember Lor 1 yang telah bersertifikasi. Metode analisis menggunakan metode kualitas data yang terdiri dari Uji Validitas Data dan Uji Reliabilitas Data, kemudian menggunakan Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heterokedastisitas. Kemudian selanjutnya ada Analisis Regresi Berganda yang terdiri dari Uji F dan Koefisien Determinasi dan yang terakhir adalah Uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Melalui uji validitas, instrumen penelitian dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,3440 dengan signifikansi 5%. Dan hasil uji reliabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* (α) > standar reliabilitas yaitu sebesar 0,6. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah reliabel. Untuk uji normalitas menggunakan fasilitas SPSS dengan menggunakan tabel *Kolmogorov Smirnov*, dimana untuk nilai *probability asymp. Sig.* adalah sebesar 0,200. Dengan kata lain, data tersebut telah terdistribusi normal. Untuk hasil dari uji Multikolinieritas didapatkan bahwa masing-masing variabel independennya memiliki nilai TV (*Tolerance Value*) > 0,1 dan nilai VIF (*Variance Influence Factor*) < 10, maka antara variabel independennya tidak terjadi multikolinieritas. Pada hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* juga didapatkan bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola dan menyebar secara tidak beraturan, dengan kata lain tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi berganda didapatkan untuk persamaan regresi liniernya adalah $Y = 21,676 + 0,982X_1 + 0,415X_2 + 0,518X_3 + e$. Untuk hasil koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan bahwa 57,4% produktivitas sekolah SDN Jember Lor 1 dipengaruhi oleh prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran. Serta hasil dari uji F adalah model regresi dinyatakan signifikan dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan yang terakhir adalah uji t, hasil dari pengujian ini adalah masing-masing variabel bebasnya memiliki nilai sig diatas standar nilai sig yaitu 0,05. Untuk variabel prinsip keadilan pengelolaan anggaran (X_1), didapat nilai sig sebesar 0,022 maka disimpulkan bahwa H_1 diterima, yaitu prinsip keadilan berpengaruh terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1. Selanjutnya untuk variabel akuntabilitas pengelolaan anggaran (X_2), didapat nilai sig sebesar 0,030 maka disimpulkan bahwa H_2 diterima, yaitu akuntabilitas pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1. Dan yang terakhir adalah transparansi pengelolaan anggaran (X_3) didapat nilai sig

sebesar 0,019 maka disimpulkan H_3 diterima, yaitu transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap prokdutivitas SDN Jember Lor 1.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat penyertaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Prinsip Keadilan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Kajian Persepsi Guru SDN Jember Lor 1)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Andriana, SE., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Djoko Supatmoko MM., Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Arnoldus Soro, Ibu Beatrix Dasowio, Sdri. Maria Claudia Melanie, Sdr. Fransiskus Xaverius Junago, Sdr. Albert Sebastian Gani yang telah memberikan semangat dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Sahabatku Hesti Kurniawati yang dengan sabar telah membantu dan berbagi ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 1 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Keagenan	6
2.1.2 Teori Good Corporate Governance	6
2.1.3 Prinsip Keadilan	7
2.1.4 Prinsip Akuntabilitas	8
2.1.5 Prinsip Transparansi	10
2.1.6 Anggaran Pendidikan	12

2.1.7 Produktivitas	15
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Penelitian	17
2.4 Pengembangan Hipotesis	18
BAB 3. METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data	22
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	23
3.5 Metode Analisis	25
3.5.1 Uji Kualitas Data	25
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	25
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	27
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	29
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Analisis Deskriptif	31
4.2 Uji Kualitas Data	33
4.2.1 Uji Validitas Data	33
4.2.2 Uji Reliabilitas Data	36
4.3 Uji Asumsi Klasik	37
4.3.1 Uji Normalitas	37
4.3.2 Uji Multikolinieritas	38
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	39
4.4 Analisis Regresi Berganda	40
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	42
4.5 Uji F	43
4.6 Uji Hipotesis	44
4.6.1 Uji t	44
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	46

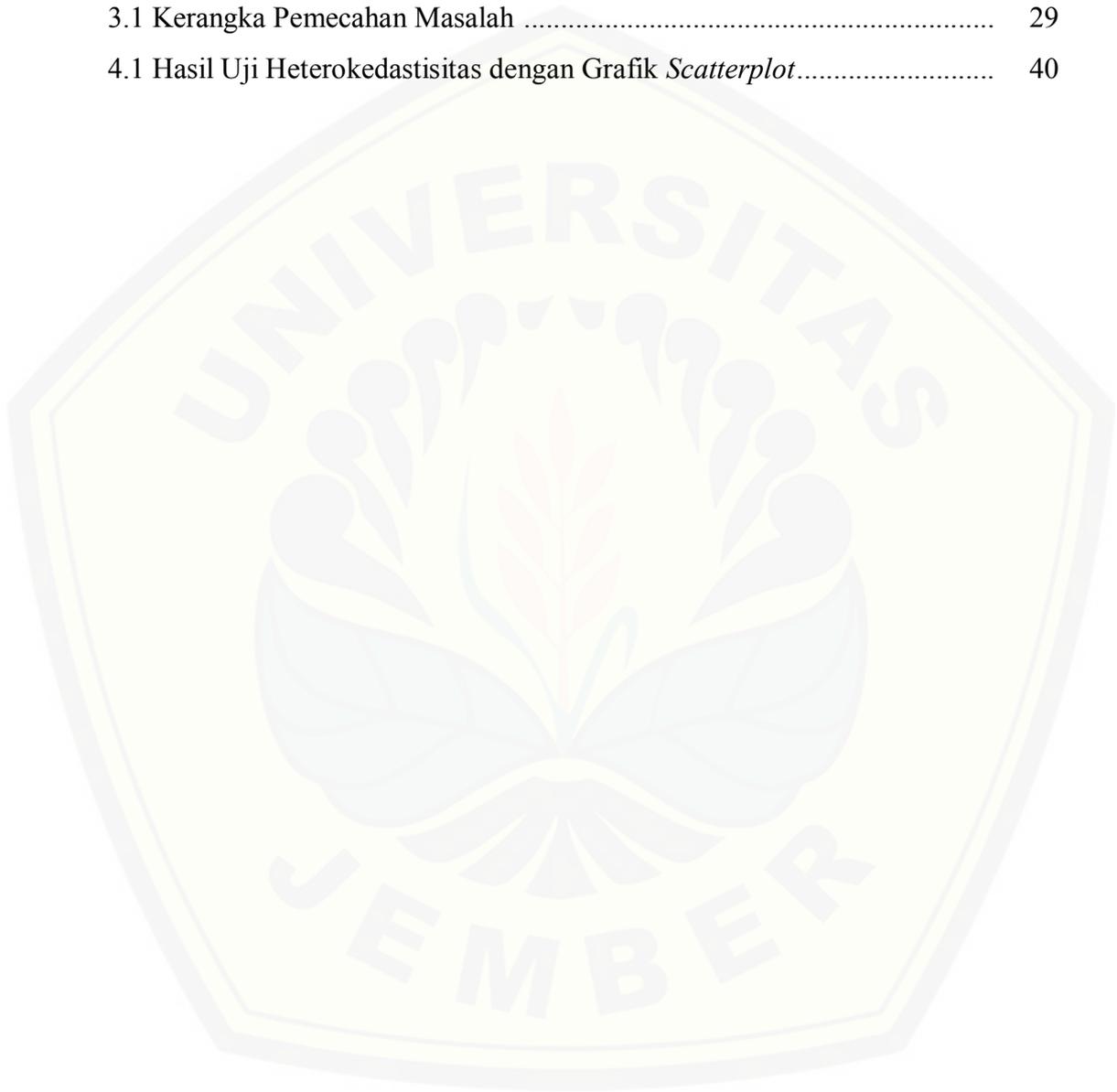
4.7.1	Pengaruh Prinsip Keadilan Pengelolaan	
	Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	46
4.7.2	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan	
	Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	47
4.7.3	Pengaruh Transparansi Pengelolaan	
	Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	48
BAB 5. PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Distribusi Kuesioner	31
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	32
4.3 Karakteristi Responden Berdasarkan Masa Kerja	32
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Guru	33
4.5 Hasil Uji Validitas Prinsip KeadilanPengelolaan Anggaran	34
4.6 Hasil Uji Validistas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	34
4.7 Hasil Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Anggaran	35
4.8 Hasil Uji Validitas Produktivitas SDN Jember Lor 1	35
4.9 Hasil Uji Reliabilitas	36
4.10 Hasil Uji Normalitas	37
4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	38
4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas	39
4.13 Hasil Analisis Regresi Berganda	41
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	43
4.15 Hasil Uji F	44
4.16 Hasil Uji t	45

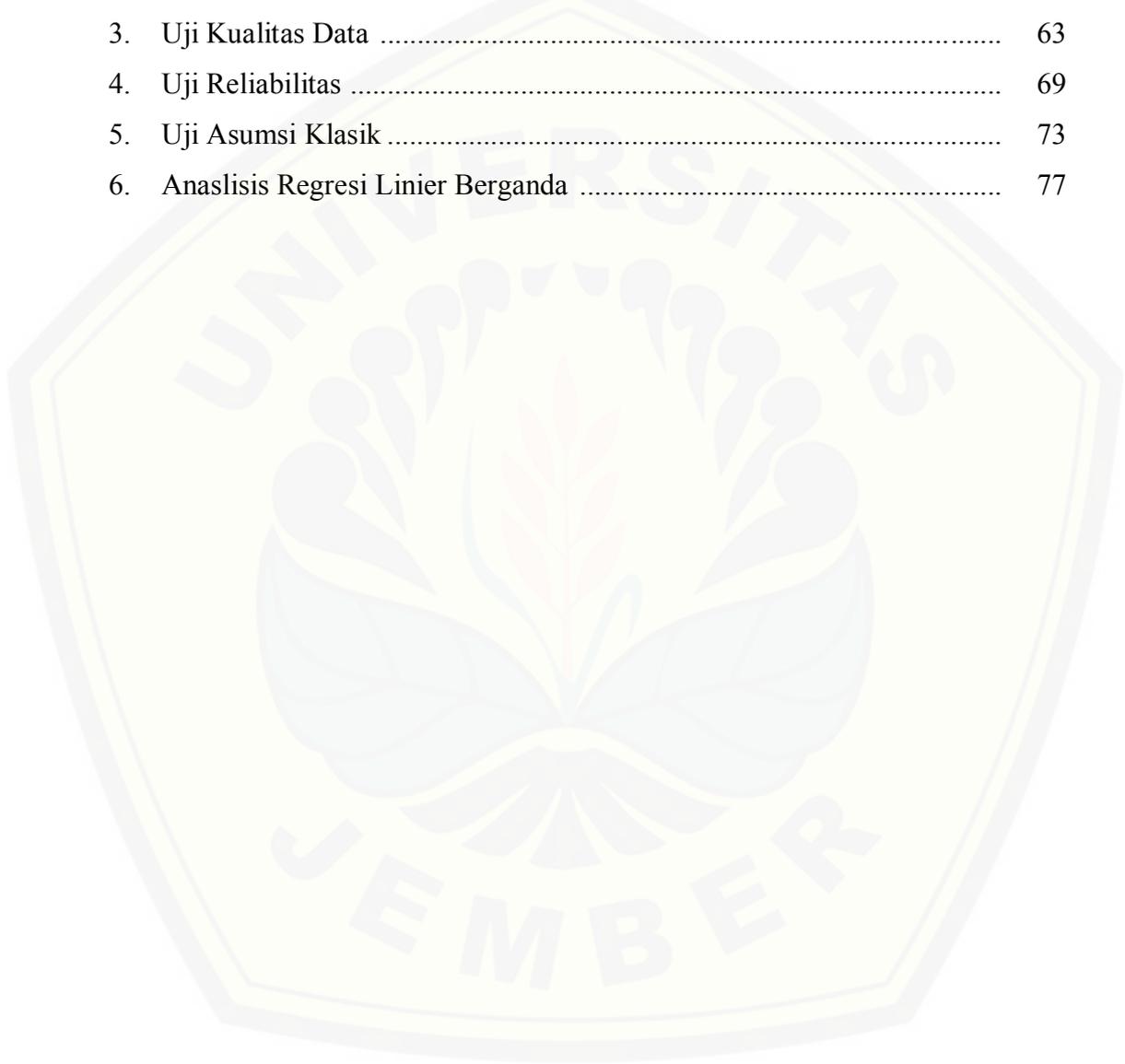
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	18
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	29
4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Grafik <i>Scatterplot</i>	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	56
2. Statistik Deskriptif Data Responden	59
3. Uji Kualitas Data	63
4. Uji Reliabilitas	69
5. Uji Asumsi Klasik	73
6. Analisis Regresi Linier Berganda	77



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia, maka program pendidikan harus menjawab kebutuhan manusia secara utuh dalam menghadapi kenyataan hidup yang terus berubah (Nuh, 2013). Pendidikan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bidang pendidikan ternyata mendapat perhatian secara khusus karena pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dalam meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek. Dunia pendidikan di Indonesia mempunyai banyak sekali rintangan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, diantaranya merupakan keterbatasan akses kepada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, dan juga mutu guru yang masih kurang.

Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil berujung pada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Badan Program Pembangunan kembali merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru untuk tahun 2013. Dalam laporan mereka, Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara yang dinilai. Pada 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Dengan nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang. Berdasarkan tulisan Djibril Muhammad. Banyak hal yang memang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, diantaranya manajemen pendidikan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban dana pendidikan dan pengawasan.

Pendidikan di Indonesia saat ini harus mengubah sudut pandangmya. Lembaga pendidikan harus mencari cara untuk bisa berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Para tenaga pendidik juga harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan yang akan dibutuhkan untuk bersaing dengan perekonomian global. Bila mutu pendidikan dari tiap lembaga pendidikan hendak

diperbaiki, maka harus ada kerja sama dari berbagai pihak. Manajemen sekolah adalah salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu sekolah yang saat-saat ini yang tidak sistematis karena pengelolaannya yang kurang baik. Mutu pendidikan akan membaik jika para pengurus lembaga pendidikan, misal guru, staf, dan komite sekolah mengubah strategi manajemen sekolah dan mulai fokus pada peningkatan produktivitas sekolah.

Faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah kebijakan politik, teknis, organisasi dan pembiayaan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tersebut, peneliti tertarik untuk memilih pembiayaan, yang dalam hal ini adalah pembiayaan pendidikan. Di dukung juga dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hoxby (2002) dan Leigh (2013) dalam Raeni (2014:5) yang menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan pendidikan, akan tetapi produktivitas sekolah justru menurun.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengelolaan pembiayaan pendidikan khususnya pengelolaan keuangan sekolah mempunyai indikator yaitu variasi sumber, alokasi dana, kecukupan dana dan prinsip pengelolaan dana. Prinsip pengelolaan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Prinsip yang melandasi pengelolaan dana pendidikan adalah prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik (Raeni, 2014), namun dalam penelitian ini hanya peneliti hanya menggunakan prinsip keadilan, akuntabilitas dan transparansi, sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian Dwi (2015).

Dalam PP No 48 Tahun 2008 pasal 59 ayat 2 menyebutkan bahwa prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau

status sosial-ekonomi. Meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan ditandai dengan meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi (Renstra Ditjen Dikmen, 2013:35).

Dalam PP No 48 Tahun 2008 pasal 59 ayat 4 prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Berdasarkan tulisan Daud (2015).

Sedangkan dalam PP No 48 Tahun 2008 pasal 59 ayat 3 menyebutkan bahwa prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: a) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian; dan b) dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Transparansi adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berdasarkan tulisan Muhammad Daud (2015).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2015). Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMPN 3 Mertoyudan Magelang), Dwi (2015) menyimpulkan bahwa secara simultan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Dalam penelitian ini, yang membedakan adalah objek

penelitiannya. Dimana peneliti mengambil objek penelitiannya adalah di SDN Jember Lor 1 Jember. Tahun-tahun sebelumnya, SDN Jember Lor 1 ini mempunyai salah satu program, yaitu Dana Sukarela, dimana dana sukarela ini didapat dari wali murid yang memberikan dana bagi sekolah secara bebas tanpa ada ketentuan. Dengan dana sukarela ini, pihak sekolah memiliki dana lebih untuk meningkatkan pengembangan murid dan digunakan untuk membiayai tenaga pendidik yang ada di SDN Jember Lor 1 yang jumlahnya kurang lebih 60 guru. Namun, tahun 2016 kebijakan bupati Bu Faedah menegaskan agar semua sekolah tidak diperkenankan menerima dana dari wali murid (dana sukarela dan sebagainya). Bu Elisabeth juga menambahkan bahwa jumlah dana BOS yang ada di SDN Jember Lor 1 tidak cukup. Salah satu faktornya adalah jumlah murid yang sangat banyak di SDN Jember Lor 1. Pihak sekolah tidak bisa melakukan upaya untuk menambah ataupun mengurangi murid di sekolah tersebut. Di SDN Jember Lor 1 ini terdiri dari 6 kelas yang masing-masing kelas memiliki 31 murid atau 32 murid dan terdiri dari 6 paralel kelas. Namun, pihak sekolah pun selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan dana BOS guna kepentingan sekolah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang pengaruh prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1. Dan diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran pengelolaan keuangan SDN SDN Jember Lor 1 dan pengaruhnya terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh prinsip keadilan pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?

3. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prinsip keadilan pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi SDN Jember Lor 1, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan informasi tentang prinsip pengelolaan dana pendidikan yang dapat meningkatkan produktivitas sekolah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, pengalaman, dan dapat mengimplementasikan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi yang meneliti hal yang sama dengan menambah variabel ataupun objek penelitian lainnya.
4. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu akuntansi dan menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sejenis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Raharjo, 2007). Persepektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan *stakeholder* (pemegang saham).

Hal tersebut adalah sama dengan tujuan pada setiap organisasi sektor publik, khususnya dalam bidang pendidikan pada instansi. Pemerintah yang berperan sebagai prinsipal mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada instansi selaku agen dalam memberikan ilmu pendidikan bagi anak-anak di tiap jenjang guna kepentingan publik. Dalam hal ini prinsipal berhak untuk mengawasi kinerja agem dalam mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Namun, dalam perkembangannya, prinsipal tidak mungkin lagi mengawasi secara langsung kinerja agen yang memiliki tanggung jawab terhadap instansi, sehingga prinsipal membutuhkan jasa dari pihak ketiga, yang merupakan masyarakat. Masyarakat mempercayakan kepada sekolah untuk melakukan upaya terhadap pendidikan anak-anak.

2.1.2 Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksinya, para pemegang saham dan stakeholders (OECD dalam Hapsari, 2011). Hapsari juga menambahkan *corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan

sasaran-sasaran (*objectives*) dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dan sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance Indonesia* (KNKCGI), empat komponen utama GCG yaitu kewajaran/kesetaraan (*fairness*), transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Supatmi, 2007).

Dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai investor mempunyai keinginan dan keyakinan bahwa instansi-instansi yang ada akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pemerintah sebagai investor menghendaki adanya pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiap instansi pendidikan setiap periode dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan.

2.1.3 Prinsip Keadilan

Salah satu unsur dari *good corporate governance* adalah *fairness* (keadilan). Keadilan yang berarti menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatannya, sebuah entitas harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Prinsip keadilan disini dimaksudkan dalam arti menegakkan keadilan bagi semua masyarakat, yang dilandasi oleh nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Keadilan memang penting apalagi keadilan tidak bisa dipisahkan dari dasar negara kita, Pancasila. Lebih khususnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis kepada Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup serta didukung oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kelsen (2010) berpendapat bahwa menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif-terutama

kecocokan dengan undang-undang. Kelsen menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”. Prinsip keadilan juga memiliki pengertian yang hampir sama, yang dijabarkan dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 (pasal 9) tentang kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2.1.4 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dalam teori *corporate governance*, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh suatu entitas. Pemegang saham atau investor menghendaki pertanggungjawaban dari manajer atas segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebuah entitas. Sehubungan dengan teori agensi yang juga terfokus pada pemegang saham (prinsipal) dan juga manajer (agen), yang mana prinsipal mendelegasikan suatu tanggung jawab dalam pengambilan keputusan kepada agen.

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan dan kedisiplinan melengkapi pekerjaan dan pelaporan. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya (Anam, 2014:11). Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina dalam Mahendrati, 2013:12). Menurut *Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability*, akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang

berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan (Anggraini, 2013:205). Menurut Ardiyanto (2008) dalam Wulandari (2014) dimensi akuntabilitas meliputi:

1. Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan.
2. Akuntabilitas Finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara proporsional.
3. Akuntabilitas Administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang diterima.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Mahendrati (2013) terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administratif. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif serta murah biaya.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.5 Prinsip Transparansi

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Konsep *corporate governance* berkaitan erat dengan teori keagenan. Pemegang saham (prinsipal) memberikan wewenang kepada manajemen (agen) untuk mengelola perusahaan dan menghendaki laporan keuangan yang transparan. Namun, manajemen seringkali bertindak tidak seperti yang diharapkan oleh pemegang saham karena juga memiliki alasan lain, seperti meningkatkan kemakmuran manajemen sendiri. Hal semacam ini tidak sejalan dengan teori *corporate governance* yang mempunyai tujuan tidak menguntungkan bagi pemegang saham.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina dalam Mahendrati, 2013:14). Secara lebih sederhana, transparansi dapat dipahami sebagai prinsip keterbukaan dimana membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan aktivitas ekonomi suatu lembaga atau organisasi. Anggaran yang disusun dapat dikatakan transparan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) terdapat penggunaan kebijakan anggaran, 2) tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses, 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat

waktu, 4) terakomodasinya suara/usulan masyarakat, 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Purnama, 2013:14).

Menurut KK, SAP (2005) dalam Purnama (2013), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur ketika kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Anggraini menyatakan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder melalui informasi yang diberikan dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Hamid Muhammad (2007) dalam Mahendrati (2013) terdapat upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik, antara lain:

1. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.
2. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.
3. Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik.
4. Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas data dan base dan sarana informasi dan komunikasi.

Mahendrati menambahkan untuk aspek keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa.

2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Anggaran Pendidikan

2.1.6.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dalam organisasi, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan baya/pengeluaran dan pihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun (Halim, 2008) dalam Shaleh (2014). Karena perencanaan yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (Poerwanto, 2013).

Pengertian lainnya menyebutkan bahwa anggaran merupakan penghubung antara perencanaan dan pengendalian, dimana merupakan perwujudan untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan dan pengendalian, dimana merupakan perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang secara jelas memuat apa yang harus dikerjakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan selama satu tahun. Menurut Jones dan Pendlebury (2000) dalam Shaleh (2014).

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang

harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif (Atmaja, Harun dan Ibrahim, 2016;120).

Sedangkan anggaran pendidikan bisa diartikan sebagai alokasi anggaran ada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Dwi, 2014;17). Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-VI I 2008 memutuskan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2.1.6.2 Sumber Anggaran Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sumber dana merupakan bagian dana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Hampir tidak ada upaya yang dapat mengabaikan fungsi biaya, maka dapat disebutkan tanpa biaya, proses pendidikan di lembaga pendidikan tidak dapat berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga (yang dapat diuangkan) (Arifi, 2008).

Penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Perhitungan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, gaji guru dan pegawai lainnya. Terdapat beragam dalam komponen dalam biaya pendidikan, umumnya menghitung dari biaya nyata (*real cost*) atau disebut *money cost*, sedangkan biaya peluang (*opportunity cost*) sebagai biaya yang harus dibayar (Atmaja, Harun dan Ibrahim, 2016;120).

Menurut Supriadi (2003) dalam Dwi (2014) pembiayaan pendidikan, baik dari segi mikro maupun makro dikenal terdiri dari beberapa kategori biaya. Pertama, biaya langsung, yang adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan biaya tidak langsung yakni biaya yang berasal dari pengeluaran tidak langsung menunjang proses pendidikan. Kedua, biaya pribadi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan keluarga atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Ketiga, biaya dalam bentuk uang dan bukan uang.

Atmaja, Harun dan Ibrahim (2016) juga menambahkan jika standar nasional pendidikan juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan adanya standar, tenaga pengajar tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum.

2.1.6.3 Pertanggungjawaban Anggaran Pendidikan

Menurut Isjoni (2006) dalam Shaleh (2014), perlu perencanaan strategik dalam pembangunan pendidikan dilakukan, dimana harus dimulai. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Alokasi Dana. Pembangunan pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan akan membutuhkan dana untuk melaksanakannya. Alokasi dana yang memadai dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas guru, membangun sarana dan prasarana pendidikan dan instrumen-instrumen lain yang menunjang mutu pendidikan;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia. Guru adalah orang pertama dan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang berkualitas akan mentransformasikan pengetahuan yang dimiliki kepada anak didiknya;
3. Sarana dan Prasarana. Tersedianya sarana penunjang dalam proses belajar mengajar akan banyak mempengaruhi mutu pendidikan.

Pembangunan ruang belajar yang layak akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pengadaan perpustakaan yang memadai akan menunjang proses peningkatan mutu pendidikan. Laboratorium yang handal akan memberikan akses untuk ilmu pengetahuan.

Pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan untuk atasan langsung bendahara atau untuk instansi terkait (Atmaja, Harun dan Ibrahim, 2016;123). Atmaja, Harun dan Ibrahim juga menambahkan bahwa penyampaian pertanggungjawaban harus disertai dengan bukti pengeluaran asli dengan tembusan yang disampaikan ke setjen kemdiknas Biro Keuangan.

2.1.6 Produktivitas

Produktivitas dilakukan sebagai tolak ukur pemanfaatan faktor produksi dan peran serta tenaga kerja dalam proses produksi. Hal ini penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan perluasan kerja. (Mufida, 2011:19). Produktivitas adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan dalam Rapareni, 2013:219). Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (*the will*) dan upaya (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang. Hartman (1998) dalam Raeni (2014) menyebutkan bahwa faktor dalam produktivitas sekolah adalah kebijakan politik dan teknis. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah organisasi dan pembiayaan. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, peneliti tertarik dengan pembiayaan pendidikan.

Menurut formulasi *National Productivity Board* (NPB) Singapura, produktivitas adalah sikap mental (*attitude of main*) yang mempunyai semangat

untuk melakukan peningkatan perbaikan. Menurut Lestari (2009) dalam Mufida (2011) untuk memperjelas arti produktivitas dibawah ini tercantum beberapa pengertian produktivitas yaitu:

1. Produktivitas sebagai perbandingan totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan periode tertentu.
2. Produktivitas adalah hubungan antar barang dan jasa yang dihasilkan dan sumber-sumber masukan (*input*) yang digunakan biasanya dinyatakan sebagai rasio besarnya keluaran (*output*) terhadap masukan (*input*).
3. Produktivitas sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu atau diartikan juga sebagai perbandingan antara penghasilan (*output*) dengan pengorbanan (*input*).
4. Produktivitas merupakan perbandingan atau rasio antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) yang digunakan.

Menurut Nitisemito (1992) dalam Mufida (2011), ada beberapa hal yang dapat menurunkan produktivitas kerja yaitu:

1. *Labour Turn Over* (LTO)

Apabila didalam suatu perusahaan terjadi peningkatan perputaran tenaga kerja maka hal ini merupakan indikasi turunnya semangat dan gairah kerja. Jika hal ini dibiarkan atau diambil tindakan perbaikan maka akan mengurangi hasil produktivitas.

2. Tingkat Absensi

Tingginya tingkat absensi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas kerja, karena semakin banyak tenaga kerja yang absen mengakibatkan tenaga kerja tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga hasil yang diproduski semakin kecil.

3. Kegelisahan Dimana-mana

Kegelisahan bisa terjadi apabila semangat dan kegairahan kerja menurun, seorang manajer harus mengetahui adanya kegelisahan yang timbul. Kegelisahan ini dapat berupa kerja tidak nyaman, keluh kesah,

dan lain-lain. Semua itu akan mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja sehingga hasil yang dicapai kurang memuaskan dan tidak memenuhi standart kerja normal.

4. Pemogokan

Pemogokan juga merupakan perwujudan dari ketidakpastian dan kegelisahan dimana jika hal ini memuncak maka akan mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin untuk mencegah timbulnya pemogokan karena selain menurunkan produktivitas kerja juga bisa menimbulkan kelumpuhan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi (2015) di Semarang, yang juga meneliti tentang pengaruh prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah. Dwi (2015) menyimpulkan bahwa secara simultan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas sekolah. Secara parsial, Dwi (2015) juga menyimpulkan bahwa secara parsial prinsip keadilan berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah. Selanjutnya, secara parsial prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah. Dan yang terakhir, secara parsial prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah.

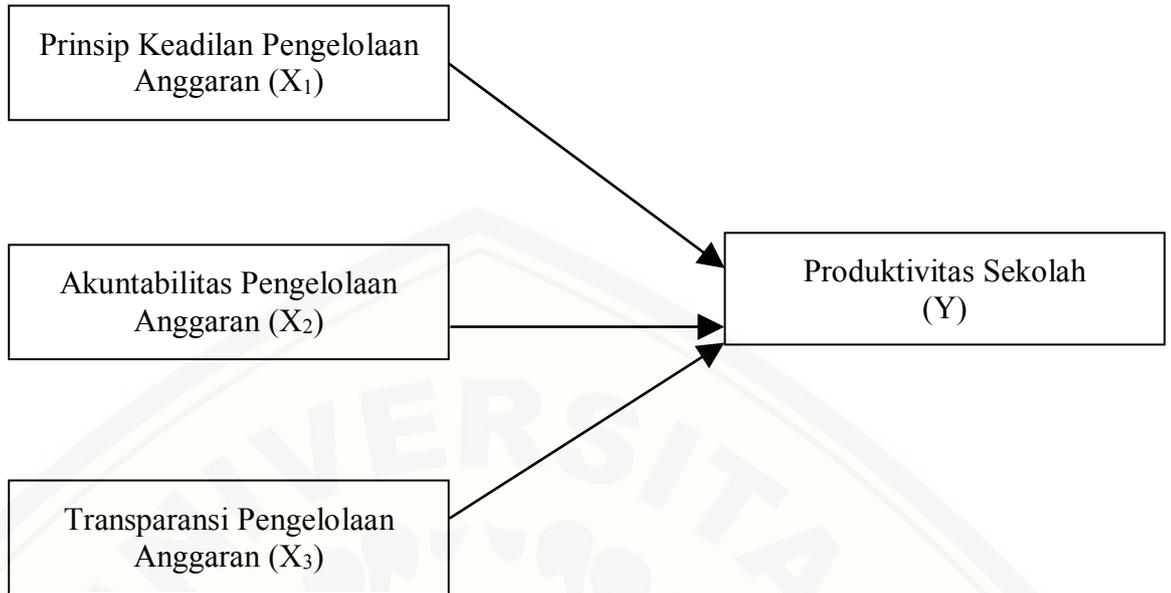
Selain penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2015), terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Utama (2013) yang meneliti pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri Eks RSBI se-kota Semarang, menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja guru secara parsial, dan hanya akuntabilitas serta responsibilitas pengelolaan keuangan yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru. Sedangkan secara simultan

prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja guru. Dan penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Raeni (2014) yang melakukan penelitian yaitu tentang penelitian prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap produktivitas sekolah. Dari penelitian tersebut Raeni menyimpulkan bahwa prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Secara parsial, prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah, hanya prinsip transparansi pengelolaan keuangan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saya dengan penelitian terdahulu adalah dari objek penelitian. Dimana penelitian ini objek penelitiannya ditujukan kepada SDN Jember Lor 1 dengan kajian persepsi guru-guru di SDN Jember Lor 1, sedangkan penelitian Dwi (2015) dilakukan di SMPN 3 Mertoyudan Magelang.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan serta penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini adalah pengaruh prinsip keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah. Variabel independen yang digunakan adalah prinsip keadilan pengelolaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan transparansi pengelolaan anggaran. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah produktivitas sekolah. Untuk pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Prinsip Keadilan Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah

Dalam teori keagenan, hubungan agensi ini muncul ketika satu orang atau lebih (principal) bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal ini agen jelas mempunyai informasi yang lebih banyak karena mengetahui segala keadaan dan kondisi suatu lembaga. Kemungkinan besar pun, apa yang disampaikan agen kepada principal tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan prinsip keadilan adalah salah satu faktor yang sangat penting agar principal dan agen dapat bekerja sama dengan baik dan agen juga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya secara adil.

Sama halnya dengan teori GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawaban kepada para stakeholders. Dalam hal ini keadilan merupakan kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam (*intern*).

Meningkatnya pembiayaan yang berkeadilan ditandai dengan meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. (Renstra Ditjen Dikmen, 2013:35). Keadilan merupakan kesamaan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada masyarakat. Dalam dunia pendidikan, keadilan adalah salah satu dasar yang paling diperhatikan. Semakin tinggi keadilan pengelolaan anggaran sekolah, maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya produktivitas sekolah.

Dwi (2015) melakukan penelitian dalam kaitanya dengan prinsip keadilan pengelolaan anggaran, menemukan bahwa prinsip keadilan berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Prinsip keadilan pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah.

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Sedangkan GCG (*Good Corporate Governance*) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan

adalah menyangkut masalah akuntabilitas, khususnya implementasi mekanisme kerja untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang berjalan kepada masyarakat luas dan lingkungan. Menurut Hult (2006) dalam Mahendrati (2013), akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan, perbuatan, dan kealpaan seseorang kepada yang berkepentingan.

Dana yang dikelola secara akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan pihak sekolah dan para *stakeholders*. Semakin tinggi rasa tanggung jawab yang dimiliki sekolah kepada masyarakat dan lingkungan, maka juga akan meningkatkan produktivitas sekolah.

Dwi (2015) juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Akuntabilitas pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah.

2.4.3 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah

Anggraini (2013) menyatakan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

Transparansi merupakan tuntutan bagi setiap lembaga agar produktivitas dari lembaga tersebut juga meningkat. Keterbukaan informasi yang disampaikan secara tepat waktu dan akurat merupakan perwujudan dari transparansi. Lembaga yang mempunyai tingkat transparansi yang tinggi akan membuat *stakeholders* memberikan kepercayaan yang tinggi pula kepada lembaga tersebut. Transparansi dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* melalui informasi

yang diberikan dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. Transparansi memiliki makna yaitu memberikan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Transparansi juga ditekankan untuk mengandung informasi yang terbuka dan sebenar-benarnya atas aktivitas yang dilakukan dalam suatu lembaga.

Dwi (2015) melakukan penelitian dalam kaitannya dengan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dwi menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Raeni (2014) juga menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap produktivitas secara simultan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13), metode kuantitatif adalah metode ilmiah (*scientific*) karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiyono, 2013:13).

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian : SDN Jember Lor 1 Jember.

Lokasi Penelitian : Jl. PB. Sudirman No. 82 Jember

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Populasi dari penelitian ini adalah semua guru yang mengajar di SDN Jember Lor 1 Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*, dengan menggunakan media kuesioner. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. (Sugiyono, 2013: 69). Sugiyono (2013) menyebutkan kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kriteria penelitian dilakukan kepada guru-guru SDN Jember Lor 1 yang telah disertifikasi.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini ada 1 (satu) variabel terikat (variabel dependen) yaitu produktivitas sekolah dan 3 (tiga) variabel bebas (variabel independen) antara lain keadilan pengelolaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan transparansi pengelolaan anggaran. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam mengukur variabel terikat dan variabel bebas adalah dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2013:134), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan pemberian skor dengan ketentuan sebagai berikut:

SS	: Sangat Setuju	= 5
S	: Setuju	= 4
RR	: Ragu-Ragu	= 3
TS	: Tidak Setuju	= 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	= 1

Konsep definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Produktivitas dalam dunia pendidikan mengandung makna bahwa dengan keseluruhan proses perencanaan dan pendayagunaan sumber daya (*input*) untuk merealisasikan tujuan awal pendidikan secara efektif, yang dapat dilihat dari *output* pendidikan yang berupa prestasi dan mutu atau kualitas lulusan.

Pada penelitian ini produktivitas sekolah diukur dengan menggunakan instrumen dari Thomas (2013) dalam Dwi (2015) dengan indikator sebagai berikut: (1) keefektifan, (2) efisiensi internal, (3) efisiensi eksternal, dan (4) mutu lulusan.

b. Variabel Bebas (Variabel Independen)

1. Keadilan Pengelolaan Anggaran (X_1)

Keadilan adalah melakukan sesuatu sesuai kebutuhan, tempat dan fungsinya tanpa melihat latar belakang dan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi atas hak dan kewajiban yang patut diberikan kepada semua individu.

Pada penelitian ini keadilan pengelolaan anggaran diukur dengan menggunakan instrumen dari Dwi (2015) dengan indikator sebagai berikut: (1) adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, (2) tersedianya layanan-layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (X_2)

Akuntabilitas adalah dorongan psikologis untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kegiatan yang dijalankan kepada lingkungan dan masyarakat tertentu.

Pada penelitian ini akuntabilitas pengelolaan anggaran diukur dengan menggunakan instrumen dari Dwi (2015) dengan indikator sebagai berikut: (1) sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan, (2) adanya pelaporan keuangan secara periodik, (3) keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS.

3. Transparansi Pengelolaan Anggaran (X_3)

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan sebenar-benarnya tentang penyelenggaraan aktivitas atau program sekolah.

Pada penelitian ini transparansi pengelolaan anggaran diukur dengan menggunakan instrumen dari Dwi (2015) dengan indikator sebagai berikut: (1) keterbukaan kebijakan anggaran sekolah, (2) keterbukaan

laporan pertanggung jawaban, (3) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Raeni (2014), uji validitas berguna untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Valid artinya ketepatan dan kecermatan mengukur sebuah variabel yang akan diukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor dari item-item pertanyaan menggunakan SPSS dengan fasilitas *coefficient correlation pearson*. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Data

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang konsisten dalam mengukur gejala yang sama (Sugiyono, 2007:110). Reliabilitas menunjukkan hasil pengukuran relatif konsisten apabila diukur beberapa kali. Pengukuran butir pernyataan dilakukan dengan sekali menyebarkan kuesioner kepada responden dan hasilnya diukur dengan korelasi antara skor jawaban pada butir pernyataan yang sama menggunakan SPSS dengan fasilitas *cornbanch alpha* (α). Item-item pertanyaan dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *cornbanch alpha* (α) > 0,6 (Ghozali, 2011:42).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan

tingkat signifikansi 5%. Jika *Probability asymp.sig (2tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data memiliki distribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mendeteksi multikolinieritas, diantaranya dengan menggunakan *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dikatakan multikol apabila nilai VIF disekitar angka 10 (Santoso, 2006:38). Apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance value* $> 0,1$, maka tidak terjadi multikolinier, dan apabila nilai VIF > 10 dan *tolerance value* $< 0,1$, maka terjadi multikolinier.

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Santoso (2006), uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Kriteria terjadi atau tidaknya heterokedastisitas antara lain:

1. Apabila membentuk pola tertentu serta titik-titik (*point-point*) yang ada berkumpul pada satu sisi (bergelombang, menyebar dan menyempit) atau titik-titik berada di dekat nilai 0 sumbu Y, maka telah terjadi heterokedastisitas.
2. Apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara tidak beraturan maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Menurut Siregar (2013) regresi adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*variable dependet*). Bila dijabarkan secara matematis bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Produktivitas Sekolah
a	= Konstanta
b ₁	= Koefisien Regresi X ₁
b ₂	= Koefisien Regresi X ₂
b ₃	= Koefisien Regresi X ₃
X ₁	= Keadilan Pengelolaan Anggaran
X ₂	= Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
X ₃	= Transparansi Pengelolaan Anggaran
e	= Kesalahan Residual (error turn)

3.5.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dengan signifikansi 0,05. Jika nilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebasnya terhadap variabel terikat.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) ini mencerminkan seberapa besar varians dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel independen X.

Dengan kata lain, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan Prinsip Keadilan Pengelolaan Anggaran (X_1), Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (X_2), dan Transparansi Pengelolaan Anggaran (X_3) mampu menjelaskan Produktivitas Sekolah (Y). Besarnya nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka satu maka model yang diusulkan dikatakan baik, karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Ghozali, 2011:169).

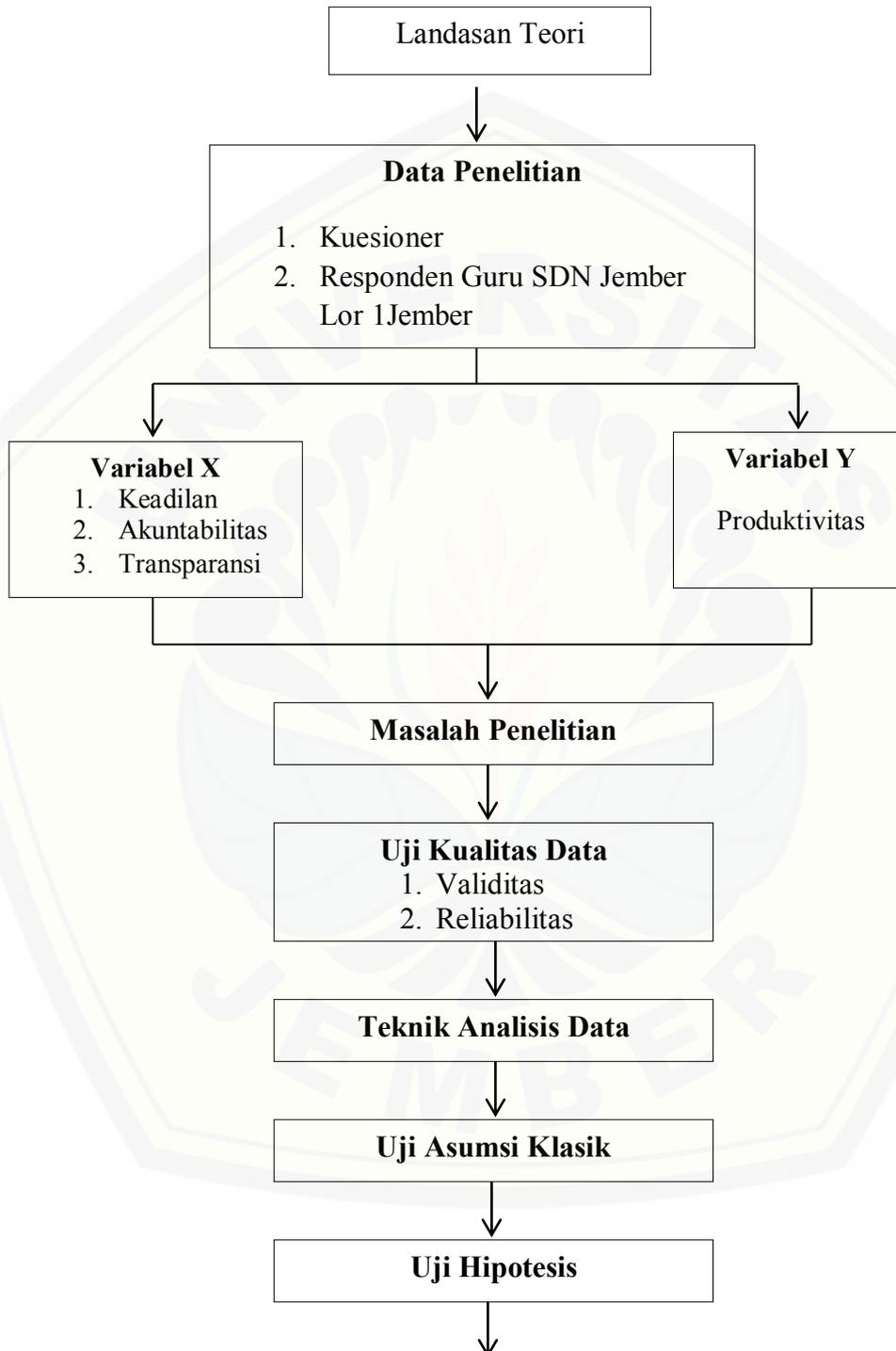
3.6.1 Uji Hipotesis

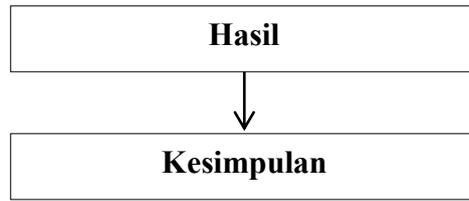
3.6.1.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel *coefficient* pada kolom sig. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dikatakan terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

3.6.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dapat digambarkan seperti dibawah ini:





Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat keadilan dalam pengelolaan anggaran maka produktivitas sekolah pun akan semakin meningkat. Prinsip keadilan merupakan salah satu elemen yang penting dalam meningkatkan produktivitas sekolah. Selain adanya kebijakan yang difokuskan kepada kebutuhan sekolah, namun pemberian beasiswa dan pembinaan khusus bagu siswa yang kurang mampu juga mampu meningkatkan produktivitas sekolah, khususnya SDN Jember Lor 1.
2. Akuntabilitas pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab yang dimiliki pihak sekolah dalam mengelola anggaran dan melaporkan pelaksanaan APBS sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara tepat waktu, dapat meningkatkan produktivitas SDN Jember Lor 1.
3. Transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap produktivitas SDN Jember Lor 1. Transparansi pengelolaan anggaran juga salah satu elemen yang penting untuk meningkatkan kepercayaan pihak internal (komite dan guru) serta eksternal (pemerintah, orang tua, dan masyarakat) terhadap setiap kebijakan dan program yang akan ditetapkan dari sekolah SDN Jember Lor 1, tentunya dengan informasi yang cukup dan akurat. Hal ini menunjukkan semakin tinggi rasa keterbukaan pihak sekolah atas kebijakan-kebijakan sekolah serta lewat laporan keuangan sekolah

kepada pihak-pihak yang bersangkutan, maka akan meningkatkan pula produktivitas sekolah khususnya di SDN Jember Lor 1.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini dimana dapat disajikan bahan perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh prinsip keadilan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mendatang. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu menggunakan variabel-variabel yang lain, yang juga berpengaruh terhadap produktivitas, misalnya efisiensi, kewajaran/fairness, dan responsibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Obyektivitas, Integritas, Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja dan Motivasi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Inspektorat Kabupaten Jember*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Anggraini, Ristya Dwi. 2013. *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Halaman 201-208.
- Arifin, Zainul. 2012. *Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Universitas Jember.
- Budiman, Asep Bangbang. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Tingkat Profitabilitas di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Garut*. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Dwi Setyawan, M. Hidayat. 2015. *Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMPN 3 Mertoyudan Magelang)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Erwantosi. 2010. *Analisis Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi BOS Pada SMP Di Kota Padang*. Tesis. Pascasarjana Universitas Andalas. 2010.
- Fadillah, Harits. 2011. *Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan Di Indonesia Pasca Reformasi*. Makalah STMIK Amikom. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hapsari, Indri. 2011. *Hubungan Antara Good Corporate dan Transparansi dengan Kinerja Perusahaan*. Jurnal.
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hoxby, C. M. 2002. *School Choice and School Productivity (or Could School Choice be a Tide That Lifts All Boats)*. Working paper No. 8873 JEL No. 12, H0, J0.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (Revisi 2010) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
- Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 2010. *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia. Bandung.
- Latan, Hengky dan Temalagi, Selva. 2013. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mahendrati, Laksmi D. 2013. *Pengaruh Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (Studi Empiris Pada SDN Se-Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Mufida, Ifta Ilma. 2011. *Pengaruh Anggaran Partisipatif Terhadap Produktivitas Kerja Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Teknis Daerah Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.

Nuh, Muhammad. 2013. *Menyemai Kreator Peradaban*. Penerbit ZAMAN. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Purnama Sari, Deasy Dwi. 2013. *Analisis Pengaruh Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Layanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.

Raeni, Rediana Setiyani. 2014. *Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK (Kajian Persepsi Guru SMK Se-Kabupaten Kendal)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective)*. Fokus Ekonomi. Vol 2 (1). 37-46.

Rapareni, Yussi. 2013. *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Guru Yayasan Jihadiyah Palembang*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Abdi Nusa. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol. 3 No. 3 Th. 2013. Hal. 216-229. September.

Samryn, L. M. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Santoso, Singgih. 2006. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Sedarmayanti. 1996. *Produktivitas Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Mandor Maju. Bandung.

- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Edisi: 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Shaleh, Khairul. 2014. *Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Tingkat Kelulusan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 3. Hal. 1833. November.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Supatmi. 2007. *Corporate Governance dan Kinerja Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 14 Th. 2007. Hal 183-192. Salatiga. Jawa Tengah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- , 2014. *Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar Untuk Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Utama, Aditya. 2013. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Eks RSBI Se-Kota Semarang*.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. 2013. *Analisis Efisiensi Program Studi dan Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Jurnal Juni Vol. 7 No. 2 Th. 2013. Yogyakarta.

Wulandari, Putri Setya. 2014. *Pengaruh Biaya Operasional dan Efisiensi Usaha Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.

Website:

<http://nasional.republika.co.id/> (diakses tanggal 27 September 2015 jam 11:52).

www.mediapendidikan.info (diakses tanggal 1 Oktober 2015 jam 18.01).

www.mediapendidikan.info (diakses tanggal 1 Oktober 2015 jam 19.05).

